

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam otonomi daerah sangat penting untuk memahami cara pemerintah mengelola keuangan. Masyarakat berharap otonomi daerah akan meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan warga, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemajuan tersebut (Mardiasmo, 2002). Masyarakat berharap otonomi daerah akan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardiasmo), 2002). Semakin banyak berita tentang transparansi keuangan publik Indonesia menjadi perhatian publik. Ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut:

1. Selama krisis ekonomi dan gejolak keuangan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah menurun.
2. Desentralisasi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena otonomi daerah mengubah pola belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aliyah, "State of Form") (Keuangan Negara, 2011).

Pada dasarnya, transparansi dapat membantu organisasi dan daerah. Saat ini, sebagian besar peraturan transparansi tidak mencakup hukuman,

yang membuat pelaksanaan dan penegakan lebih sulit. Oleh karena itu, pemerintah daerah di semua tingkatan harus sangat berdedikasi untuk membuat pengelolaan keuangan menjadi publik dan jelas. Tekanan kelembagaan cenderung meningkat di lingkungan dengan akuntabilitas yang rendah dan pengukuran, kontrol yang lemah atau tidak akurat (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004).

Reformasi laporan keuangan adalah salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena pemerintah bertindak untuk memenuhi amanat masyarakat, mereka harus dapat memberi tahu semua orang tentang keuangan secara jujur dan terbuka (Aliyah, 2012). Untuk meningkatkan laporan keuangan berkualitas tinggi, menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan, pada gilirannya, membuat pengelolaan keuangan pemerintahan daerah lebih transparan (Sukhemi, 2011). Pelaporan keuangan dilakukan untuk dua alasan dalam mekanisme tata kelola: memastikan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan (Hess, 2007). Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah membuat Peraturan Daerah untuk meningkatkan transparansi. Di Indonesia, setidaknya 12 pemerintah dan kotamadya telah memberlakukan peraturan daerah yang memastikan partisipasi publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (radarbanten.com). Beberapa pemerintah dan kota sudah memiliki peraturan yang dapat dilihat secara transparan. Di antaranya adalah Lebak, Boyolali, Kebumen, Solok, Magelang, Kota Surabaya,

Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Berdasarkan UU Transparansi Periklanan No. 2008, beberapa negara telah mengeluarkan peraturan yang mengatur transparansi dan partisipasi publik. Ini mencakup pengembangan kebijakan publik, agenda kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan untuk pengambilan keputusan tersebut, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang jelas. Namun, mereka masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan peraturan daerah, terutama di tingkat SKPD sebagai penegaknya. Pada dasarnya, transparansi dapat membantu organisasi dan daerah. Saat ini, sebagian besar peraturan transparansi tidak mencakup hukuman, yang membuat pelaksanaan dan penegakan lebih sulit. Oleh karena itu, pemerintah daerah di semua tingkatan harus sangat berdedikasi untuk membuat pengelolaan keuangan menjadi publik dan jelas.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004, daerah diberi otonomi, wewenang, dan tugas sesuai dengan undang-undang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Otonomi daerah harus tetap ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan otonomi daerah dapat mencapai tiga tujuan berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

3. Meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2010).

Pada fenomena penelitian ini saya mengutip dari berita ditahun lalu tepatnya Kamis, 24 Oktober 2019 Bupati purbalingga didampinngi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan sidak terhadap perkembangan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang diduga lambat dalam pengerjaannya Beberapa proyek yang dimonitor di antaranya adalah perbaikan stadion goentoe darjono, menambah kapasitas jalan Bojong-Panican, membangun UPT sentra industri kecil dan menengah (IKM) logam di jalan koprul tanwir, kemudian bupati juga meninjau pemeliharaan di Jalan Karangren, Purwadadi, Kutasari. Secara umum, pengelola lokasi mengatakan bahwa kemajuan konstruksi untuk beberapa proyek mungkin aman atau dapat diterima, dan kemungkinan besar akan selesai tepat waktu. Untuk proyek pemeliharaan Jalan Karangren-Purwadadi, Sudin Kutasari, bupati memiliki catatan khusus. Seperti yang dinyatakan bupati, proyek jalan Karangren-Purwadadi belum mencapai target pelaksanaan. Diberitakan bahwa CV Cipta Usaha menerima kontrak pemeliharaan jalan tengah senilai Rp 2,5 miliar. Selain itu, Bupati mempertimbangkan untuk membangun Pusat Industri UPT Metal IKM di Jalan Koprul Tanwir. Dia juga mencatat proyek pemeliharaan jalan Karangren-Purwadadi. Itu karena proyek tersebut menerima dana DAK sebesar Rp 12,57 miliar. Proyek yang didanai oleh DAK harus selesai sebelum kontrak diputuskan. Jika tidak, mereka akan dikenakan biaya dari APBD sampai selesai.

Dengan diberlakukannya sidak oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan ini Bupati Purbalingga dan Dinas terkait serius dalam mengawasi dengan melihat anggaran besar dan keseriusan Pemerintah dalam memberikan fasilitas publik. Sehingga fasilitas publik dapat di gunakan dan memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat kabupaten purbalingga. Di mana hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pemprov Purbalingga harus memberikan informasi kepada masyarakat secara teratur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Organisasi publik harus menjalankan administrasi yang baik, transparan, efisien, dan akuntabel. Fakta bahwa proyek di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat secara jelas melalui pemeriksaan dan pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tanggung jawabny dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Sumber data: <http://www.rmoljateng.com>).

Tekanan eksternal, seperti aturan pemerintah, datang dari sumber lain. Adanya peraturan ini tampaknya bertujuan untuk meningkatkan praktik yang ada (Ridha, 2012). Akan tetapi didalam penerapannya peraturan Pemerintah masih mencoba menerapkan daerah tersebut, terutama SKPD di tingkat pelaksana. Selain itu, tekanan eksternal dapat berupa dorongan atau penolakan untuk mematuhi kebijakan di luar bisnis, seperti dukungan atau penentangan publik, atau dorongan atau larangan pemerintah melalui peraturan, undang-undang, atau kebiasaan yang berlaku. Setiap komponen

lingkungan perusahaan selalu berhubungan dengan unsur-unsur luar. Semua karyawan dipaksa untuk menyelesaikan tugas operasional dengan benar karena tekanan eksternal. Proses ini dibuat lebih transparan, seperti menggunakan auditor eksternal yang independen, dan transparansi pelaporan keuangan meningkat ketika proses berjalan lancar (Dewi, 2015). Dengan ini penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi Fakhi Iriyanto, 2014), dan (Ni Wayan Septiani Dewi Dkk, 2015) membuktikan bahwa tekanan dari sumber luar membantu meningkatkan transparansi pelaporan keuangan ini termasuk aturan dan kebijakan untuk mendukung transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Julian dan Belian (2015) dan Dewi et al. (2015) menemukan bahwa elemen yang berkaitan dengan hasil tekanan eksternal tidak memengaruhi transparansi laporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan adalah ketika organisasi tidak yakin dengan peraturan tertentu, yang akan membuat mereka tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan peraturan baru. Pemimpin organisasi akan memutuskan untuk meniru organisasi yang mereka anggap sukses dalam keadaan sulit. Dalam kasus ini, ketidakpastian lingkungan adalah keadaan di mana SKPD menghadapi Ketidakpastian dapat disebabkan oleh SKPD yang bersumber dari eksternal, seperti seringnya terjadi perubahan regulasi dan perubahan regulasi lainnya. mengenali dan mengganti karyawan dengan cepat. Kondisi harus disesuaikan dengan SKPD dalam praktik dan operasional. Transparansi dalam pelaporan keuangan adalah fokus penelitian ini (Deddy (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rian Noprizal (2017) dan Wendhi Adha (2014) menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, tetapi penelitian lain yang dilakukan dengan alasan yang sama menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan meningkatkan transparansi informasi keuangan (Fardian, 2014), (Julita dan Belian, 2015) dan (Satyaningsih et al., 2014). Partisipasi dalam kepemimpinan berarti ingin membantu organisasi. Apakah mungkin bagi manajemen untuk menggabungkan elemen loyalitas dan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik? Komitmen organisasi membantu transparansi pelaporan keuangan, menurut Hastuti (2015) dan Dewi et al. (2015). Komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan, menurut penelitian lain seperti Julita dan Belian (2015) dan Purnamasari (2015).

Setelah melakukan beberapa penelitian tentang pelaksanaan transparansi laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini akan fokus pada SKPD Kabupaten Purbalingga. Studi yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) dilanjutkan dengan penelitian ini. Dalam beberapa hal, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya, lokasi, waktu, dan metode penelitian dipilih di Yogyakarta pada tahun 2012, tetapi digunakan di Purbalingga pada tahun 2019. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini lebih berfokus pada

komponen yang memungkinkan pengukuran fenomena sosial yang objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan hanya kuesioner atau angket. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul “*Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi). Penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga*”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor eksternal apa saja yang berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah transparansi pelaporan keuangan mendapat manfaat dari ketidakpastian lingkungan?
3. Apakah komitmen manajemen membuat laporan keuangan menjadi lebih jelas?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini agar dapat dilakukan lebih fokus dan spesifik maka peneliti memiliki pandangan bahwa masalah penelitian yang diangkat perlu pemahaman variabel dan periode dalam melakukan penelitian ini sehingga dilakukan penelitian pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018 dan hanya berkaitan dengan “*Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap pelaporan keuangan daerah yang transparan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga*”.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.
- b. Memberikan bukti langsung dampak ketidakpastian lingkungan dan komite pengawas terhadap transparansi pelaporan keuangan.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan menguntungkan para pemakai laporan keuangan, yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Studi ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa transparansi yang baik dengan mempertimbangkan faktor eksternal, ketidakpastian lingkungan, pertanggungjawaban dan peraturan pelaporan keuangan daerah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

b. Bagi penleti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan variabel yang sama dan melengkapi.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini akan memungkinkan penilaian tingkat pemahaman orang tentang penerapan transparansi

pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana otonomi daerah dapat digunakan untuk mengelola laporan keuangan, mengelola sumber daya, meningkatkan layanan sosial dan kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

